

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
2. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
3. DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa dari ketiga variabel independen yang diteliti, hanya PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas, sedangkan pengangguran terbuka dan DAK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memiliki beberapa implikasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka

Walaupun secara statistik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadaai dampak jangka panjang dari pengangguran terbuka. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja formal agar masyarakat tidak hanya bekerja, tetapi memperoleh penghasilan yang layak.

Ketidaksignifikanan ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas dan produktivitas kerja.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan PAD dapat memperkuat pembangunan di daerah serta membantu mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi diarahkan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal, seperti pengembangan potensi desa wisata berbasis potensi lokal seperti pengembangan desa di wilayah Melung dan Cilongok yang memiliki potensi wisata alam. Selain itu, retribusi parkir di pusat keramaian seperti Gor Satria, Alun-Alun Purwokerto, serta pusat kuliner malam juga dapat diatur dan dikelola secara resmi untuk menambah PAD.

Sementara itu, intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan sumber PAD yang telah ada, misalnya dengan digitalisasi sistem pajak restoran dan hotel, melalui sistem digital dan pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Selain itu, pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi yang sudah ada juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah, serta melakukan penyesuaian tarif pajak daerah sesuai dengan perkembangan nilai ekonomi wilayah. Dengan PAD yang

meningkat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program yang menasar langsung masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. DAK yang bersifat *specific grant* dan diarahkan untuk membiayai program-program tertentu yang menjadi prioritas nasional, maka dibutuhkan upaya agar pelaksanaan program DAK selaras dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK, terutama dengan melakukan evaluasi terhadap proporsi dan implementasi program yang dibiayai melalui DAK Nonfisik, yang pada kenyataannya memiliki alokasi yang lebih besar dibandingkan DAK Fisik di beberapa tahun terakhir.

DAK Nonfisik seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), atau Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), meskipun penting untuk pelayanan dasar, belum tentu langsung menasar masyarakat miskin secara spesifik. Misalnya, Dana BOS cenderung terbagi rata ke semua sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa dari keluarga miskin, atau Dana BOK yang belum menjangkau layanan promotif-preventif secara optimal di desa terpencil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme targeting yang lebih baik agar DAK Nonfisik diarahkan ke wilayah dan kelompok masyarakat miskin, seperti

penambahan jangkauan Dana BOK untuk posyandu dan layanan kesehatan desa di wilayah seperti Kemranjen, Lumbir, atau Sumpiuh.

DAK Fisik juga perlu diarahkan ke infrastruktur dasar yang benar-benar mendukung penurunan kemiskinan, seperti pembangunan sarana air bersih, jalan akses ke sentra produksi rakyat, atau rehabilitasi seolah rusak di daerah miskin, bukan hanya untuk pembangunan bersifat administratif atau kurang berdampak langsung. Dengan demikian DAK terhadap kemiskinan tidak semata karena besarnya dana, melainkan karena ketidaktepatan sasaran dan efektivitas programnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang mendorong sinkronisasi antara program DAK dan prioritas penanggulangan kemiskinan, serta memastikan bahwa program-program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok miskin, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan variabel DAK secara agregat, tanpa mengklasifikasikan penggunaannya berdasarkan jenis belanja.
2. DAK dalam penelitian ini belum dijabarkan berdasarkan sektornya, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, padahal masing-masing sektor dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap penurunan kemiskinan.
3. Keterbatasan ini menyebabkan analisis terhadap pengaruh DAK terhadap kemiskinan masih bersifat umum dan belum menangkap dampak spesifiknya.